

CINDY ASTRIANI

Judul : Implementasi Pengendalian Internal Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Perguruan Tinggi

Informan : Auditor Internal

Target : efektivitas audit internal, metode deteksi fraud, dan pemantauan sistem pengendalian.

Pertanyaan wawancara :

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran dan kontribusi audit internal dalam mencegah terjadinya kecurangan atau fraud di lingkungan kampus ini, dan seberapa sering audit dilakukan di masing-masing unit kerja?

Perannya besar, ya, Mbak. Karena audit internal itu fokus pada pengendalian di masing-masing institusi atau unit. Audit internal diharapkan menjadi pengawas yang bisa memberikan rekomendasi tentang apa saja yang perlu diperbaiki dalam manajemen mutu baik dari sisi keuangan, kinerja karyawan, maupun kepatuhan terhadap sistem, regulasi, dan kebijakan institusi. Dengan begitu, saat ada audit eksternal, kelemahan-kelemahan yang ada di unit sudah diminimalkan.

Itu tergantung kebijakan masing-masing institusi. Karena auditor internal itu kan karyawan tetap di perusahaan. Di tempat saya biasanya audit internal dilakukan **setahun sekali**. Tapi setelah itu ada yang disebut dengan **surveillance**. Surveillance itu untuk **mengawal atau mengawasi rekomendasi** yang diberikan saat audit sebelumnya. Misalnya audit dilakukan bulan April, maka unit diberi waktu untuk memperbaiki temuan. Lalu, pada bulan Januari, dilakukan surveillance untuk melihat apakah rekomendasi tersebut sudah dijalankan.

2. Apakah dalam pelaksanaan audit internal digunakan standar atau pedoman tertentu, seperti kerangka kerja COSO atau lainnya? Jika ya, bagaimana implementasinya dalam praktik sehari-hari?

Iya, kerangka COSO itu memang digunakan sebagai acuan dalam audit internal. Tapi kita juga melihat apakah institusinya sudah siap menerapkan COSO atau belum. Kalau belum, kita sesuaikan. Tapi rekomendasi tetap diberikan agar nantinya standar COSO bisa diimplementasikan.

- **Lingkungan Pengendalian:**

Ini berkaitan dengan budaya kerja. Misalnya, jika ada unit yang keberatan diaudit ("kok diaudit terus"), itu menunjukkan lingkungan kerja yang belum mendukung pengendalian. Budaya seperti itu harus diubah.

- **Penilaian Risiko:**

Setiap unit harus memiliki manajemen risiko. Identifikasi risiko-risiko besar (misal, persaingan) dan siapkan mitigasi (misal, inovasi produk). Sayangnya, banyak unit yang tidak melakukan ini.

- **Aktivitas Pengendalian:**

Struktur organisasi harus jelas. Jangan sampai satu orang memegang dua fungsi penting seperti kasir dan penagihan. Itu menyalahi prinsip pengendalian internal.

- **Informasi dan Komunikasi:**

Semua temuan harus disampaikan ke kepala unit agar mereka ikut

memantau dan melakukan pengawasan secara langsung karena mereka yang paling dekat dengan proses harian.

- **Pemantauan:**

Harus dilakukan **secara berkala**, tidak hanya setahun sekali. Idealnya, dilakukan **per unit setiap bulan atau triwulan**, sehingga bisa lebih intensif dan akurat dalam mengawasi jalannya sistem pengendalian.

3. Ketika auditor menemukan indikasi adanya fraud, apa langkah atau prosedur yang biasanya dilakukan oleh tim audit dalam menangani temuan tersebut?
Kalau sebagai auditor internal, temuan itu disampaikan dulu ke kepala unit. Lalu dibahas dalam rapat internal. Apakah temuan itu diterima atau tidak. Bila diterima dan mengarah pada fraud, maka unit tersebut akan direkomendasikan untuk diaudit ulang. Tapi audit ulang ini bersifat **investigatif** dan **lebih mendalam**, bukan audit internal biasa. Dokumen-dokumen diperiksa kembali, pihak terkait dipanggil, dan di interview. Namun, auditor internal hanya sebatas memberikan **rekomendasi**. Keputusan akhir tetap di tangan manajemen, apakah akan dimutasi, diberhentikan, atau ditindak secara hukum.
4. Bagaimana hubungan kerja atau kolaborasi antara auditor internal dan SPI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penanganan risiko di kampus ini?
Auditor internal adalah **perpanjangan tangan SPI**. SPI tidak bisa mengawasi sendiri seluruh unit, maka auditor internal bertugas membantu pengawasan. Idealnya, auditor internal itu **stay** (tetap berada) di SPI, bukan paruh waktu. Pengawasan idealnya dilakukan **setiap tiga bulan sekali**, agar perubahan atau penyimpangan bisa cepat dideteksi.
5. Apakah audit internal kampus saat ini telah memanfaatkan teknologi seperti big data analytics atau software audit? Jika ya, bagaimana teknologi tersebut membantu dalam mendeteksi potensi kecurangan?
Saat ini masih **manual**, tapi bukan tulis tangan ya. Sudah menggunakan **Excel**. Belum ada sistem khusus untuk audit internal. Data diperoleh dari sistem masing-masing unit, kemudian auditor mengambil data tersebut untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi, **pengolahan auditnya masih belum sistematis** secara digital.

Informan : Kepala LSPI (Lembaga Sistem Pengawasan Internal)

Target : Kebijakan strategis, pelaksanaan pengawasan, struktur dan SOP pengendalian internal, evaluasi, koordinasi antar unit, pencegahan fraud, dan tindak lanjut pengawasan.

Pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana struktur organisasi LSPI dibentuk dan apa peran utama masing-masing dalam mendukung fungsi pengawasan internal kampus?
"Jadi, kalau di UJK itu, seperti yang kalian lihat, hanya saya sendiri yang di sini. Tapi kami sedang merekrut staf auditor karena memang pekerjaannya tidak rutin. Yang rutin itu mungkin hanya setahun sekali atau dua kali. Kalau ada kebutuhan pengawasan, kami menggunakan tim ad hoc. Tim ini akan bekerja ketika ada pengawasan yang perlu dilakukan. Sedangkan yang tetap hanya saya dan satu staf. Audit yang dilakukan tidak hanya pada bidang keuangan, tapi juga terhadap kemungkinan adanya kecurangan. Tapi itu semua harus berdasarkan surat tugas

dari pimpinan (rektorat). Kalau tidak ada surat tugas, kami tidak bisa melakukan audit."

2. Apa visi, misi, dan kebijakan strategis LSPI dalam membangun sistem pengendalian internal yang efektif dan mencegah terjadinya kecurangan di perguruan tinggi?
"Kalau dilihat, sebenarnya kami ini baru pindahan. Dulu saya berada di depan bersama BPM, sekarang berdiri sendiri sebagai lembaga. Kalau dulu jadi satu dengan BPM, sekarang kami menjadi lembaga yang independen. Harusnya ada papan visi-misi, nanti bisa saya tunjukkan. Dari situ bisa dilihat kontribusi kami dalam sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan. Kalau di UMSIDA sendiri sekarang namanya bukan SPI lagi, tapi Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Internal (LPPPI). Saya juga bisa kasih SK pembentukannya. Itu semua tertulis di sana."
3. Bagaimana pelaksanaan audit internal dijalankan oleh SPI, termasuk SOP yang digunakan dan bagaimana mekanisme evaluasi serta monitoring pengendalian internal dilakukan secara rutin?
"Setiap kami melakukan pekerjaan, pasti berdasarkan SOP. Misalnya, SOP mengharuskan koordinasi terlebih dahulu, ya kami lakukan koordinasi. Kami juga memberi tahu ke mana kami akan audit. Setelah itu, kami turun ke lapangan untuk audit. Misalnya, audit ke Fakultas Bisnis, Hukum, dan Industri. Kami akan ke dekanat dan memeriksa. Selama pemeriksaan, kalau ada temuan, kami sampaikan ke dekanat. Kalau mereka bisa menunjukkan dokumentasi bahwa hal tersebut sudah diperbaiki, kami anggap selesai. Tapi kalau tidak ada bukti, maka itu menjadi temuan. Setelah itu, kami membuat laporan. Laporan itu disampaikan hanya ke unit yang diaudit, tidak ke seluruh pihak. Setelah ada persetujuan dari unit terkait, baru kami membuat laporan menyeluruh yang dikumpulkan untuk pimpinan universitas."
4. Unit kerja mana saja yang dinilai paling rentan terhadap risiko kecurangan, dan bagaimana prosedur SPI dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran atau fraud yang terjadi?
"Kalau ditanya unit mana yang rentan, kami tidak bisa sebutkan karena itu bagian dari etika kami sebagai auditor. Audit karena kecurangan biasanya dilakukan karena ada aduan. Aduan tersebut bisa datang dari siapa saja. Setelah itu, kami mendapatkan surat tugas dari rektorat untuk melakukan audit. Kami melakukan pemeriksaan dan komunikasi dengan pihak terlapor. Jika mereka bisa menunjukkan bukti bahwa tidak ada kecurangan, maka tidak akan kami lanjutkan. Tapi kalau temuan kami valid, dan pelaku menyetujuinya, laporan akan kami teruskan ke pimpinan universitas. Selanjutnya, tugas kami hanya sampai menyusun laporan. Untuk sanksi atau kebijakan lainnya, semuanya berada di tangan pimpinan universitas dan DPSDM. Mereka yang akan menindaklanjuti berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku."
5. Apa saja indikator kinerja utama (KPI) yang digunakan LSPI/SPI untuk mengukur keberhasilan implementasi sistem pengendalian internal, serta strategi dalam menghadapi tantangan selama proses pengawasan?

Jadi, kalau kita bicara tentang indikator kinerja, yang paling utama adalah berkurangnya jumlah temuan dari tahun ke tahun. Semakin sedikit temuan berarti semakin baik sistem yang berjalan. Selain itu, tingkat tindak lanjut terhadap rekomendasi audit juga menjadi indikator penting.

Laporan yang ditindaklanjuti oleh unit kerja, serta adanya perbaikan sistem atau SOP setelah audit dilakukan, itu semua menunjukkan keberhasilan kerja LPPPI."

Indikator Kinerja Utama dan Tambahan

Yang dimaksud dengan IKO adalah *Indikator Kinerja Utama*. Di LPPI (Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Internal), kami memiliki dua jenis indikator, yaitu IKO dan IKT. IKO atau *Indikator Kinerja Utama* mencerminkan keberhasilan bisnis utama dari institusi. Dalam konteks UMSIDA, bisnis utamanya adalah pendidikan. Namun, LPPI tidak memiliki IKO karena LPPI tidak berada dalam ranah utama pendidikan. Oleh karena itu, yang kami miliki adalah IKT (*Indikator Kinerja Tambahan*) dan SIK (*Supporting Indikator Kinerja*).

IKT yang Diterapkan LPPI

Indikator kinerja tambahan kami mengacu pada kegiatan-kegiatan seperti audit keuangan, audit aset, dan audit SDM.

Untuk audit keuangan, kami mengevaluasi mulai dari perencanaan, implementasi, hingga apakah target sudah sesuai atau tidak.

Dalam audit aset, kami melakukan pengecekan fisik terhadap aset UMSIDA dan mencocokkannya dengan catatan sistem. Jika ditemukan perbedaan antara data fisik dan catatan, kami akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi ke pihak yang bertanggung jawab, seperti Direktorat Pengelolaan Aset dan Lingkungan.

Sedangkan untuk audit SDM, kami menilai apakah pelatihan untuk peningkatan kompetensi telah dilakukan, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berjalan. Selain itu, kami juga memantau pengembangan karir dosen, termasuk pelaksanaan SK yang sesuai dengan ketentuan. Hal ini mencakup pemeriksaan apakah seorang dosen benar-benar melaksanakan kewajibannya mengajar sesuai beban kerja.

6. Bagaimana cara LSPI/SPI menjalin koordinasi dan integrasi pengawasan dengan unit-unit lain, seperti keuangan, akademik, maupun unit penunjang, termasuk dalam proses tindak lanjut rekomendasi hasil audit?

Koordinasi dan Integrasi Pengawasan dengan Unit Lain

LPPI menjalin koordinasi dan integrasi pengawasan dengan unit-unit lain, seperti SDM, aset, dan keuangan, melalui sistem informasi yang sudah terintegrasi. Kami memiliki akses terhadap semua sistem ini, seperti:

- **SINTA** untuk aset

- **E-Budgeting** untuk keuangan
- **Simpek** untuk kepegawaian

Dengan akses ini, kami dapat melakukan pengawasan dari kantor secara efisien. Namun, tetap ada batasan. Sistem bisa saja mengalami error, sehingga kami tetap perlu melakukan konfirmasi manual, baik melalui komunikasi langsung atau via telepon kepada unit terkait jika ditemukan ketidaksesuaian data.

7. Bagaimana pendekatan SPI dalam memastikan nilai-nilai organisasi terinternalisasi dalam budaya kerja, serta bagaimana perlindungan terhadap identitas pelapor (whistleblower) dikelola dengan aman?

Pendekatan LPPI dalam Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi yang dijunjung oleh LPPI meliputi *uswah* (keteladanan), mandiri, sinergi, dan integritas. Sebagai lembaga pengawasan, LPPI sering menghadapi resistensi karena mengungkapkan kebenaran, bahkan terhadap hal-hal kecil seperti pegawai yang hanya hadir untuk absen tanpa bekerja sungguh-sungguh. Namun, LPPI tetap berkomitmen menjadi teladan dengan terus bekerja secara profesional dan objektif.

Kami percaya bahwa meskipun berada di lingkungan yang tidak selalu mendukung integritas, LPPI tetap harus menjadi minoritas yang memegang teguh nilai kebenaran.

Prinsip Uswah (keteladanan), Mandiri, Sinergi, dan Integritas

1. **Uswah (keteladanan)** : LPPI berusaha menjadi teladan dalam budaya kerja dengan prinsip: jika ingin diperlakukan baik, maka perlakukanlah orang lain dengan baik terlebih dahulu.
2. **Mandiri**: LPPI tidak hanya menerima tugas dari universitas, tetapi juga dari lembaga eksternal seperti LPBK PDN dan majelis di PP. Untuk itu, kami harus mampu bekerja secara mandiri dan menyelesaikan tugas-tugas dengan efisien.
3. **Sinergi**: LPPI bekerja sama dengan berbagai unit seperti keuangan, SDM, dan aset agar pengawasan berjalan efektif.
4. **Integritas**: Semua laporan disampaikan apa adanya, tanpa ditambah atau dikurangi. LPPI menjunjung tinggi kejujuran, menyampaikan hanya yang benar-benar terjadi, berdasarkan fakta dan data yang diperoleh selama proses audit.

Saya sendiri dipilih dan dipercaya memegang amanah ini karena dianggap memiliki integritas tinggi. Latar belakang saya bukan dari Muhammadiyah, sehingga saya tidak memiliki konflik kepentingan dalam menjalankan tugas. Saya juga memiliki pengalaman di kantor akuntan publik, yang semakin memperkuat dasar profesional saya.

Meskipun saya sempat berniat mundur karena tuntutan jam kerja yang tinggi dan keinginan untuk mengajar, amanah ini tetap saya jalankan karena dianggap dapat dipercaya dan netral.

Informan: Ketua BAK & Direktur Keuangan

Target Informasi: Sistem keuangan, tata kelola anggaran, transparansi, pencegahan fraud, integrasi sistem, dan akuntabilitas keuangan di perguruan tinggi.

Pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana sistem pengelolaan keuangan yang saat ini digunakan mendukung pengendalian internal dan akuntabilitas di lingkungan kampus?
Umsida menggunakan sistem keuangan Tersentral. Penerimaan dan pengeluaran dilakukan di direktorat keuangan pusat untuk dikelola dan didistribusikan kepada semua unit kerja berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang sudah disahkan melalui rapat senat universitas. Pengajuan anggaran, sampai dengan proses LPJ dilakukan dalam sistem yang bernama 2 budgeting.
2. Apakah proses verifikasi berlapis atau sistem validasi ganda sudah diterapkan dalam pengeluaran dan pencairan anggaran? Bisa dijelaskan seperti apa alurnya?
Verifikasi dan validasi dilakukan secara ganda sdh dilakukan, diawali dengan pengajuan kegiatan dan anggaran dari unit kerja utk disetujui WR2, kemudian direkap oleh DK dan dicairkan sesuai dengan waktu yg ditentukan. Distribusi ke unit kerja diinput oleh bagian pencairan dan di verifikasi dan validasi oleh direktur keuangan
3. Seberapa sering dilakukan evaluasi keuangan di tingkat fakultas atau unit kerja, dan bagaimana tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut?
Setiap 1 semester sekali (Bulan Sept - Agts)
4. Apa saja langkah nyata yang dilakukan BAK atau Direktorat Keuangan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau fraud dalam proses transaksi maupun pengadaan barang dan jasa?
Semua transaksi dilakukan secara cashless dan melalui verifikasi dan validasi ganda
5. Bagaimana sistem pelaporan dan transparansi laporan keuangan dijaga, dan apakah pelaporannya sudah berbasis digital serta sesuai standar akuntansi yang berlaku?
Pelaporan sdh dilakukan secara digital dan setiap tahun diaudit oleh KAP
6. Apakah sistem informasi keuangan sudah terintegrasi dengan sistem pengawasan internal seperti SPI/LSPI, dan sejauh mana integrasi ini membantu dalam pengawasan anggaran? Sudah
7. Jika pernah terjadi penyimpangan atau masalah dalam keuangan, bagaimana mekanisme penanganannya, dan apa tantangan terbesar dalam menjaga transparansi dan tata kelola keuangan kampus? Pelaku kecurangan akan diberikan Surat peringatan dan dikonfirmasi permasalahannya. Jika ditemukan

penyalahgunaan keuangan, pelaku akan diminta untuk mengganti dan dikeluarkan dari status karyawan

8. **Bisa nggak Bu, Ibu menjelaskan, mendefinisikan fungsi dari audit internal itu sendiri dan juga pengendalian internal yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo?** Jadi di UMSIDA itu ada yang namanya unit atau sekarang lembaga ya, yang terbaru ini sudah menjadi lembaga pengawasan kalau sekarang LPPI, jadi di UMSIDA sendiri memang kita punya sebuah lembaga yang memiliki fungsi terkait dengan pengendalian internal, kemudian kalau fungsi audit internal sendiri kalau di kita itu lebih kepada pengawasan ya, lebih kepada proses pengawasan terkait dengan proses-proses keuangan, kalau di UMSIDA ini masih terbatas di fungsi keuangan, jadi pengendalian untuk keuangan, karena kalau di beberapa perusahaan yang besar gitu ada yang sudah ranahnya tidak hanya keuangan tapi lebih macem-macem, operasional, kemudian aset, bahkan sistem informasi juga bisa masuk ke situ, tapi kalau di UMSIDA masih terbatas di fungsi pengendalian untuk keuangan. Kemudian kalau sistem pengendalian internal yang ada di kita itu mulai dari, selain dari adanya audit ya, kita mulai dari adanya pemisahan fungsi, pemisahan fungsi yang ada di UMSIDA begitu, jadi terkait dengan pengelolaan keuangan itu kalau di UMSIDA itu tersentralisasi, jadi semuanya di bawah direktorat keuangan gitu, sehingga unit-unit kerja lainnya itu ketika misalnya membutuhkan pengeluaran gitu ya, maka mereka akan melakukan pengajuan gitu kepada direktorat keuangan, jadi istilahnya tersentral gitu, tidak semua bagian di UMSIDA itu bisa melakukan pengelolaan keuangan, jadi ada pembagian fungsi tersebut. Kemudian dalam melakukan proses pencairan itu juga kita disertai dengan alur dan dokumen, jadi ada dokumentasi, ada alurnya juga gitu, jadi terkait dengan timelinenya ada periodenya. Kemudian kalau misalnya setelah pengajuan unit kerja itu juga harus membuat yang namanya laporan pertanggungjawaban, ketika unit kerja belum bikin LPJ maka dia tidak bisa mengajukan, misalnya LPJ itu deadlinenya satu bulan dari masa pencairan, ketika unit kerja tadi belum melakukan LPJ sampai dengan batas waktu satu bulan tadi, maka mereka tidak bisa melakukan pengajuan atau pencairan jadi kita batasi disitu, sehingga tercipta sebuah tata kelola keuangan yang baik gitu, jadi ada pengajuan, kemudian ada otorisasi, ada otorisasi dari yang berwenang yaitu dari bertingkat dari kepala unit, kemudian naik ke Warek 2 yang membidangi bagian keuangan, kemudian terakhir nanti ke direktorat keuangan, jadi faktorisasinya itu bertingkat gitu ketika ada pengajuan, dan itu bisa ditolak juga gitu dan pengajuan itu juga harus sesuai anggaran yang sudah ditetapkan di awal begitu, kalau misalnya memang ada kegiatan yang memang diluar anggaran itu sangat-sangat diminimalisir dan juga dokumentasi harus lengkap gitu, itu dari mulai pengajuan sudah mulai bertingkat, kemudian pencairan juga sama dilakukan cashless ya kalau di kita, jadi semua dilakukan secara transfer gitu tidak ada pemberian uang secara tunai pokoknya semua transfer, sama seperti pembayaran lah, pembayaran mahasiswa kan semuanya nggak ada yang bayar tunai ya, gitu semuanya pakai VA, walaupun misalnya pembayaran non VA, misalnya pembayaran sempro atau bayar apa kan juga transfer, jadi semuanya memang cashless, yang kedua, kemudian tadi LPJ itu. Nah kemudian setelah ada alur tadi itu ya, dan semua ada dokumentasinya karena kita by sistem jadi kita semua ter-record ya, mulai dari anggarannya seperti apa, pengajuannya seperti apa, terus otorisasinya gimana, sampai dengan LPJ nya sudah atau belum itu semuanya ter-record di sistem, jadi pasti ada dokumentasinya. Baru yang terakhir kita ada yang namanya audit, monitoringnya lewat audit, dilakukan secara berkala satu tahun sekali, gitu.
9. **Lalu, kalau ada kecurangan dalam mencegahnya itu gimana bu?** Oke, nomer satu itu tadi sistem cashless itu menjadi salah satu aturan disini, karena kalau kita pake cashless itu kan

semuanya ter-record ya, kalau kita pakai bank itu kan semuanya ter-record kita mau transfer berapapun, berapa rupiah pun kan ter-record gitu, terlihat di sistem, sedangkan kalau cash kan bisa jadi uangnya sudah diberikan, tapi dinyatakan misalnya nggak belum dikasih, itu bisa aja, jadi untuk meminimalisir itu kita pakai cashless. Kemudian yang kedua kita semuanya by sistem, jadi semua apa tadi saya sudah jelaskan, dari mulai pengajuan sampai LPJ itu semuanya by sistem, bahkan sampai pencatatan akuntansinya juga kita sudah by sistem, tinggal hanya istilahnya kita menggunakan non system itu untuk membantu saja, tapi utamanya itu sudah disediakan semua di sistem, di myUMSIDA itu, jadi itu yang menurut saya menjadi salah satu alat gitu ya untuk mencegah kecurangan, karena semuanya sudah nggak ada yang manual lagi.

10. **Menurut Ibu itu sistem keuangannya sekarang itu apakah sudah mendukung tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dimiliki sama UMSIDA bu?** Sudah sih gitu, karena kita juga di audit ya. UMSIDA itu di audit baik secara internal tadi oleh LPPI ya, dan juga secara eksternal, secara eksternal itu kita ada dua yang mengaudit, yang pertama kita ada KAP, sama yang kedua adalah dari PP Muhammadiyah, jadi dari internal Muhammadiyah itu kita juga ada audit, namanya auditor PPK gitu ya, kemudian juga kita setiap tahun juga diaudit oleh KAP gitu jadi kita punya laporan keuangan, laporan keuangannya juga diaudit ya dan sampai dengan kemarin terakhir 2024 itu kita laporan keuangannya opininya WTP (wajar tanpa pengecualian) jadi menurut saya, dengan opini WTP tersebut bisa merepresentasikan bahwa semua pengendalian internal yang ada di UMSIDA terutama di keuangan itu sudah akuntabel, karena itu bisa dibuktikan dari opini, itu sih.
11. **Apakah bagian keuangan itu pernah dievaluasi oleh pihak audit internal maupun eksternal? Lalu walaupun iya, biasanya apa yang sering dikoreksi atau diperbaiki?** Kalau sama auditor internal itu biasanya lebih kepada formalitas dokumen, misalnya gini, kalau terkait dengan alur sih nggak pernah karena insyaallah kalau secara alur tuh seperti yang sudah saya jelaskan sudah jelaskan insyaallah semua sudah akuntabel dan transparan gitu, tapi lebih kepada formalitas dokumen, karena biasanya kan yang menggunakan pengajuan atau menggunakan anggaran di UMSIDA itu kan banyak pihak ya, banyak unit kerja, baik itu direktorat, baik itu fakultas, prodi, dan lain sebagainya, terkadang kita dari direktorat keuangan itu selalu mengadakan sosialisasi ketika LPJ itu harus menyertakan apa-apa saja, misalnya bukti bukti nota itu yang harus asli harus seperti ini dan lain sebagainya, itu sudah pernah kita lakukan sosialisasi sebelumnya, tapi kan terkadang dari bagian keuangan yang ada di unit-unit kerja itu kan nggak di internal direktorat keuangan ya, tapi masuknya di unit kerja, itu kan banyak yang backgroundnya nggak dari akuntansi atau manajemen atau ekonomi, ada yang dari psikologi ada yang dari teknik macem-macem lah backgroundnya, sehingga terkadang mereka tuh kadang lupa, mungkin mereka juga nggak menyadari ternyata bukti itu penting kayak gitu-gitu, sedangkan kalau kita orang akuntansi kan kita udah tau gitu ya, oh buktinya harus gini-gini dan lain sebagainya harus lengkap, tapi terkadang para unit kerja tadi itu suka lupa gitu ya sehingga terkadang waktu mengumpulkan LPJ itu masih ada yang kurang, biasanya itu nanti kita akan ditegur sehingga biasanya yang dievaluasi atau di apa namanya dikoreksi sama pihak auditor internal itu di bagian direktorat keuangannya, walaupun juga mengoreksi di bagian unit kerja terkait gitu, tapi kita juga dikoreksi karena muara akhirnya di kita, sehingga tujuannya biar kita di direktorat keuangan itu memberikan sosialisasi lagi, mengingatkan lagi, lebih kepada formalitas dokumen-dokumen gitu, tapi kalau terkait dengan alur atau segala macam sih sejauh ini nggak pernah ya. **Kalau dari audit eksternal nya bu?** Kalau dari audit eksternalnya mungkin

yang dikoreksi lebih kepada penjurnalan misalnya, terkadang kan kita apa ada akun-akun tertentu yang mungkin secara penempatan itu kurang tepat, misalnya kita menjurnalnya dengan akun ini gitu, tapi menurut auditor itu harusnya bukan akun itu gitu tapi pakai akun lain dan lain sebagainya, lebih ke seperti itu sih, tapi kalau dari sisi pengendalian internal, kita sih sampai dengan terakhir kemarin di audit itu nggak pernah ada isu ya atau ada masalah terkait dengan pengendalian internal. Biasanya ya itu tadi, kalo eksternal itu ya terkait dengan hal-hal jurnal istilahnya buku besar pembantu, bukan kepada alur sistem pengendalian.

12. **Lalu apakah ada sering komunikasi atau kerjasama rutin antara Ibu bagian keuangan dengan SPI atau tim audit internal yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, selain yang membahas tentang LPJ seperti itu?** Kalau komunikasi rutin ya nggak rutin juga sih, biasanya memang kalau ada audit aja sih, biasanya komunikasi itu terjadi kalau pas lagi audit aja, kalau nggak lagi audit sampai dengan saat ini belum ada komunikasi lain dengan tim SPI sih.
13. **Lalu menurut Ibu tantangan terbesar apa dalam menjaga sistem keuangan yang rapi, aman, dan sesuai dengan aturan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo?** Kalau tantangan terbesar sih sebenarnya di ini ya, kalau kita belajar pengendalian internal tuh kan ada namanya lima pilar, mulai dari lingkungan pengendalian sampai yang terakhir informasi komunikasi. Kalau menurut saya memang tantangan terbesarnya tuh di lingkungan pengendalian, karena lingkungan pengendalian tuh kan macem-macem, meliputi etika, meliputi integritas, tuh kan masuk disitu kan dia menjadi pondasi. Nah, sebenarnya tangan-tangan terbesarnya disitu, kenapa? Karena terkadang kita tuh sudah bikin SOP, kita sudah bikin aturan, sudah bikin apa istilahnya, ya tata cara dan lain sebagainya, tapi kalau kita kembalikan ke humannya, karena kan pelaku dari semua pengendalian itu dari orangnya, terkadang kan kita nggak bisa tuh kontrol orang satu-satu gitu ya yang bisa kita kontrol ya kita mengadakan SOP, kita membuat kebijakan, itu yang kita bikin sistem itu bisa kita kontrol, tapi kalau terkait dengan etika orang, terkait dengan integritas orang, nah itu yang menjadi tantangan besar sih di kita, bagaimana sih lingkungan itu bisa tadi berjalan dengan baik, soalnya sebagus apapun sebuah sistem, sebagus apapun sebuah kebijakan atau sop, tapi kalau humannya sendiri dia nggak punya integritas ya sama aja gitu, makanya tantangan terbesarnya adalah di lingkungan pengendalian.
14. **Seberapa sering dilakukan evaluasi di lingkungan direktorat keuangan itu bu? dan bagaimana tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut?** Kalau audit internal itu, baik audit internal eksternal itu setahun sekali, cuman biasanya periodenya aja yang agak beda gitu ya, maksudnya bukan beda, tapi biasanya tuh kita duluan audit eksternal karena audit eksternal kan kita itu masa tahun anggarannya ya, kalau Perusahaan biasanya kan januari sampai desember ya, nah kalau di kita itu dari september sampai agustus, jadi 31 agustus tuh tutup buku kita, nah biasanya setelah 31 agustus itu kita mulai range perikatan gitu dengan KAP, nah biasanya kalau internal itu baru dimulai desemberan kayaknya ya? Atau November deh pokoknya intinya sekitaran segitu lah, jadi biasanya memang sama-sama sekali setahun cuma timelinenya aja yang agak berbeda. Kalau evaluasi yang sifatnya audit begitu, tapi kalau evaluasi antara unit kerja itu kita lakukan setiap saat, karena kan tadi seperti yang saya bilang, LPJ tuh mulai dari pengajuan sampai LPJ itu kan muaranya di direktorat keuangan, jadi misalnya dari mulai pengajuan tuh ada dokumen yang tidak lengkap atau apa namanya, pengajuannya yang tidak sesuai anggaran, nah itu biasanya udah langsung di evaluasi, begitu juga ketika proses LPJ, misalnya ketika LPJ dipetakan misalnya keperluan 2 juta tapi buktinya

tidak sampai 2 juta misalnya gitu, nah itu juga langsung dilakukan evaluasi ke unit kerja gitu, jadi kalau yang sifatnya antar unit kerja bisa setiap saat, tergantung dengan tadi proses pencairan dan juga LPJ tadi, tindak lanjutnya pun langsung di benarkan oleh unit kerja, karena kalau misalnya enggak, misalnya LPJ gitu, tahap terakhir kan dibagian direktorat keuangan melakukan verifikasi, jadi kita kayak mencentang gitu lo, kalau sudah diverifikasi, sudah dicentang maka sudah close jadi dia bisa ngajukan lagi gitu, nah kalau si unit lagi misalnya ada revisi belum atau ndak dibenerin maka kita nggak verifikasi, sehingga akhirnya efeknya kan ke nggak bisa ngajukan lagi.

15. **Bisa diberikan contoh nggak bu, langkah nyata yang dilakukan oleh direktorat keuangan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau fraud dalam proses transaksi maupun pengadaan barang dan jasa.** Kalau satu tadi, kita pasti ngecek tuh seminimal mungkin untuk melakukan transaksi kepada rekening pribadi, itu sangat diminimalkan misalnya kalau pembelian barang gitu ya, misalnya pembelian kursi, belinya dimana? Informa gitu ya, nah kita biasanya transfernya langsung ke informa bbukan transfer ke bagian yang membeli. Misalnya mbaknya gitu ya di bagian pengadaan, nah mbaknya beli nih, kan bisa aja saya transfer ke mbaknya, nanti mbaknya yang bayar gitu kan bisa, ttapi kalau di kita sebisa mungkin transfernya langsung ke pihak ketiga jadi ke tokonya gitu, itu nomor satu. Kemudian yang kedua semua dilakukan cashless, jadi semuanya dilakukan pakai transfer sehingga ter-record gitu. Kemudian yang ketiga kita selalu ada LPJ tadi dan selalu disesuaikan, jadi misalnya belinya berapa, nah kuitansi atau notanya harus sesuai dengan barangnya tadi walaupun jasa ya juga sama, misalnya jasa perbaikan apa gitu, notanya ya harus sama, mau kita misalnya konsumsi beli kue, ya notanya harus sama, baik itu jumlah barangnya gitu ya, itu harus sama, jumlah nominalnya juga harus sama. **Ini berarti itungannya ikut validasi ganda gitu ya Bu?** Iya.
16. **Jika pernah terjadi penyimpangan atau masalah dalam keuangan bagaimana mekanisme penanganannya dan apa tantangan terbesar dalam menjaga transparansi dan tata kelola keuangan di UMSIDA?** Kalau terjadi penyimpangan dan masalah keuangan, biasanya kita ajukan ke SPI karena kalau di direktorat keuangan kita tidak punya tugas atau tanggungjawab untuk melakukan audit, tapi kita bisa tau misalnya ada indikasi adanya penyimpangan atau fraud seperti penggelapan atau nota ga sesuai dsb, itu kita ajukan ke SPI untuk dilakukan adanya audit, audit yang dilakukan oleh SPI bisa bersifat berkala atau audit khusus (investigatif), tapi kalau di kita biasanya sebelum dilemparkan ke SPI kita sudah mengingatkan ke unit kerjanya, tapi kalau itu sering terjadi atau berulang baru kita naikan ke SPI.
17. **Bisa ibu berikan saran untuk Direktorat keuangan sendiri maupun dari LPPI ataupun dari audit internal.** Kalau dari kita sendiri terkait dengan proses pengawasan sepertinya perlu ditingkatkan lagi untuk frekuensinya karena selama ini kita itu setahun sekali untuk frekuensinya, menurut saya itu cukup kurang jadi lebih sering lebih baik karena ada monitoring juga, lalu unit pengendalian internal itu harusnya lebih bersikap dan lebih bersifat seperti mentor bukan hanya sebagai auditor, karena kalau sebagai auditor karena kalau sebagai auditor itu terkadang orang tuh melakukan kesalahan itu bukan karena dia ada intensi mau melakukan kesalahan, tetapi terkadang beberapa orang itu tidak tahu bahwa dia melakukan kesalahan, menurut saya itu yang menjadi salah satu fungsi dari pengendalian internal juga jadi jangan hanya sebagai auditor saja tetapi menjadi mentoring dan coaching dan juga

kalau bisa pengendalian internal tidak hanya di keuangan tapi di seluruh siklus bisnis yang ada di universitas, dari aset maupun sistem.

18.